

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK
PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT BALI BERDASARKAN
KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA
PAKRAMAN (MUDP) BALI TAHUN 2010. Keputusan No. 01/Kep/PSM-
3MDPBALI/X/2010**

Oleh

Rajuniper Manurung, NIM 1814101033

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat patrilineal Bali dan akibat dari ditetapkannya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010. Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil temuan penulis yaitu Keputusan MUDP Tahun 2010 merupakan langkah progresif yang membuka ruang bagi anak perempuan Hindu Bali untuk memperoleh hak waris, meskipun secara proporsional hanya setengah dari hak waris anak laki-laki, dan masih dengan ketentuan tertentu dan Akibat hukum dari pemberian hak waris kepada perempuan dalam masyarakat hukum adat Bali menunjukkan adanya perubahan signifikan dari aspek normatif, namun belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Adat Bali

***JURIDICAL ANALYSIS ON DIVISION OF HEIRS FOR FEMALE
ACCORDING TO BALI ADAT LAW POST ESTABLISHMENT OF THE
DECISION OF PESAMUAN AGUNG III IN PRIMARY TRIBUNAL
PAKRAMAN VILLAGE (MUDP) BALI NUMBER 01/KEP/PSM-3/MDP
BALI/X/2010***

By

Rajuniper Manurung, NIM 1814101033

Law Studies Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the implementation of the Decision of the Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) regarding the distribution of inheritance for Balinese Hindu women and explain the obstacles faced in implementing this decision. The research method that used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method, using data collection techniques through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research is that the 2010 MUDP Decision is a progressive step that opens opportunities for Balinese Hindu daughters to obtain inheritance rights, although proportionally only half of what male heirs receive and still subject to certain conditions. The legal consequences of granting inheritance rights to women in the Balinese customary law community indicate a significant normative change, although it has not yet been fully realized in practice.

Keywords : Heritage/ Legacy, Balinese customary law